

## Kasus Aktif Covid-19 Tembus 2012 Orang

**MAGELANG (KR)** - Kasus aktif pasien terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Magelang hingga Kamis (24/2), telah mencapai 2012 orang. Sehari sebelumnya, tercatat ada tambahan 212 orang. Terbanyak berasal dari Kecamatan Mungkid, 40 orang. Kemudian dari Salaman 25, Mertoyudan 24, Secang 21 dan Salam 17 orang. "Saat ini sebanyak 2012 pasien terkonfirmasi itu, sudah tersebar di 21 kecamatan. Terbanyak di beberapa kecamatan yang tingkat mobilitas warganya sangat tinggi, seperti di Kecamatan Mertoyudan, Borobudur, Mungkid dan Muntlilan," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Magelang, Nanda Cahyadi Pribadi. Terkait masih banyaknya penambahan pasien terkonfirmasi itu, kata Nanda, pihaknya minta semua pihak untuk disiplin menegakkan protokol kesehatan dimanapun berada. Disebutkan, jumlah kumulatif pasien terkonfirmasi hingga saat ini, telah mencapai 25.739 orang. Rinciannya, 2012 pasien saat ini masih dalam penyembuhan. Sebanyak 1866 diantaranya menjalani isolasi mandiri dan 146 dirawat di rumah sakit. "Kemarin juga ada tambahan seorang pasien terkonfirmasi meninggal dari Kecamatan Tempuran. Kini total pasien covid-19 yang meninggal di wilayah ini ada 1124 orang. Untuk pasien sembuh, telah mencapai 22.603 orang," sebutnya. **(Bag)**

## TNI-Polri Tegaskan Prokes Harus Ditaati

**SEMARANG (KR)** - Kota Semarang semakin gawat karena angka paparan Covid-19 varian Omicron meningkat pesat. Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengambil tindakan tegas menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Aparat kewilayahan TNI, Polri berikut Kecamatan dan Komponen Masyarakat dimintanya terjun dan berperan aktif mengawal PPKM Level 3 setiap saat. Rabu (23/2) malam, aparat gabungan TNI, Polri dan Kecamatan melakukan sosialisasi dan yustisi atas pelanggaran protokol kesehatan. Di Kecamatan Gayamsari, aparat gabungan menggelar sosialisasi dan yustisi di sekitaran Masjid Agung Jawa Tengah yang dipadati Pedagang Kaki Lima dan warung-warung makan. Kapolsek Gayamsari Kompol Hengky didampingi Danramil 04 Gayamsari Mayor Inf Rahmatullah Ar SE MM langsung menertibkan pemilih warung yang masih buka di atas pukul 21.00. **(Cha)**



KR-Chandra AN

**Kompol Hengky didampingi Danramil 04 menasihati warga agar tetap menaati prokes.**

## PLN Operasikan 104 Unit SPKLU di 38 Kota

**SEMARANG (KR)** - PT PLN (Persero) terus menambah pengoperasian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) guna mendukung terciptanya ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Hingga Kamis (24/2), sebanyak 104 unit SPKLU telah beroperasi dan melayani para pengguna kendaraan listrik di 38 kota.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi melalui Humas PLN Jateng-DIY mengatakan, PLN akan terus menambah pengoperasian SPKLU untuk memperluas jangkauan fasilitas pengisian energi kendaraan listrik. Pada tahun ini, perseroan bakal menambah 40 unit SPKLU di sejumlah kota.

"Penambahan SPKLU merupakan upaya PLN dalam meningkatkan layanan dengan memberikan kemudahan bagi pengguna kendaraan listrik dan untuk menarik minat masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik," kata Agung.

Selain menambah 40 SPKLU tahun ini, PLN juga bakal menyediakan fasilitas SPKLU Ultrafast EV Charger, sebanyak 44 unit dan 100 unit home charging untuk mendukung pelaksanaan KTT G20 di Bali, yang direncanakan mulai beroperasi pada Agustus 2022.

"Saat ini, sudah terdapat 5 unit SPKLU yang sudah beroperasi, serta 16 unit SPKLU tipe Medium dan Fast Charging dalam tahap penyelesaian pembangunan," tuturnya.

Agung mengungkapkan, penambahan dan perluasan pengoperasian SPKLU harus dilakukan agar pengendara kendaraan listrik tidak perlu khawatir baterai kendaraannya kehabisan energi listrik ketika melakukan perjalanan jauh menggunakan kendaraan listrik.

Bahkan ketika pengguna kendaraan listrik melakukan perjalanan dari Aceh sampai Surabaya tidak perlu khawatir karena SPKLU tersedia di mana-mana.

PLN pun membuka peluang kerja sama dengan pi-

hak swasta untuk mempercepat perluasan SPKLU di seluruh Indonesia. Untuk memudahkan pihak yang berminat jadi mitra dalam penyediaan SPKLU, PLN telah menyediakan website <https://layanannya.pln.co.id/partnership-spklu>.

Melalui website ini nantinya para badan usaha yang hendak turut serta dalam membangun SPKLU bisa mendaftar melalui kanal tersebut. Setelah para pengusaha mengakses maka langsung ada kolom menjadi mitra. Ikuti langkahnya dan kemudian PLN akan segera menindaklanjuti.

PLN juga akan menyediakan Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) milik PLN bagi badan usaha yang ingin bekerja sama, menyiapkan suplai listrik, serta dukungan aplikasi Charge.IN dalam pengelolaan SPKLU.

Sementara mitra dapat berperan sebagai penyedia fasilitas isi daya kendaraan listrik, penyedia lahan maupun properti, serta penyedia

operasional dan pemeliharaan SPKLU.

Agung menyebut PLN saat ini juga telah mengembangkan beberapa model bisnis untuk mendukung rencana kerja sama ini agar lebih atraktif serta efektif mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik. "Jadi bisnis ini sangat menguntungkan. Kami mengajak pelaku usaha untuk ikut membangun SPKLU sesuai skema kerja sama kemitraan berbasis revenue sharing dengan sharing

economy model," ajak Agung.

Menurut Agung, penguasaan SPKLU menjadi ceruk bisnis baru bagi dunia usaha. Berkembangnya tren kendaraan listrik di Indonesia saat ini menjadi peluang bisnis baru bagi semua pihak. Peluang bisnis ini tidak hanya terbatas di kota-kota besar saja. Agung mencontohkan bahkan di daerah Asmat, Papua sendiri porsi penggunaan motor listrik bahkan mencapai 100 persen. **(Cha)**



KR-Istimewa

**SPKLU tengah dipergunakan mengisi daya batre mobil hybrid.**

## Kota Magelang Masuk PPKM Level 4

**MAGELANG (KR)** - Memasuki PPKM level 4 Covid-19, Walikota Magelang dr HM Nur Aziz SpPD K-GH menandatangani Instruksi Walikota Magelang Nomor 7 Tahun 2022 tentang PPKM level 4 Covid-19 di wilayah Kota Magelang.

Berdasar informasi yang diperoleh, kasus Covid-19 di wilayah Kota Magelang sudah mulai menurun.

Hal ini dibenarkan Walikota Magelang saat ditemui wartawan usai mengikuti forum 'Ngobrol Pintar Bersama Pak Wali' (Ngopi Bareng Walikota Magelang) yang

dilaksanakan di kompleks Taman Kyai Langgeng (TKL) Kota Magelang, Rabu (23/2).

Didampingi Wakil Walikota Magelang Drs KHM Mansyur MAG, acara 'Ngopi Bersama Pak Wali' dilaksanakan bersama Notaris Kota Magelang.

Setelah dibuka beberapa hari

lalu, lokasi isolasi terpusat kedua langsung terisi puluhan orang. Kasus Covid-19 di wilayah Kota Magelang diharapkan sudah mulai menurun dan diharapkan melandai terus. Meskipun demikian Walikota Magelang berharap semua pihak tetap menaati protokol kesehatan.

Dalam Instruksi Walikota Magelang Nomor 7 Tahun 2022 disampaikan beberapa hal yang perlu diterapkan, diantaranya penggunaan aplikasi PeduliLindungi, pengaturan kegiatan di lokasi belanja atau pusat perda-

ngan, rumah makan, tempat bermain anak, bioskop, dan fasilitas umum.

Sementara itu berkaitan dengan kegiatan 'Ngopi Bersama Pak Wali', yang dilaksanakan di kompleks TKL Kota Magelang, Walikota Magelang kepada wartawan mengatakan di forum ini dicoba untuk dijumpai, di antaranya berkaitan dengan keluhan atau masukan-masukan dari masyarakat yang diterimanya. Dari forum ini juga diharapkan adanya take and give, untuk kemudian diolah. **(Tha)**



## Di Tengah Pandemi Covid 19, Pemkot Salatiga Subsidi Tagihan Rekening Pemakaian Air Pelanggan PDAM Kategori RTA dan Sosial Umum



**Yuliyanto, SE., MM**  
Wali Kota Salatiga

Pemkot Salatiga terus mengelindingkan program meringankan beban masyarakat di tengah melonjaknya Covid 19 yang hingga saat ini masih berlangsung.

Salah satunya di tahun 2022, Wali kota Salatiga dan PDAM Salatiga memberikan subsidi pada tagihan rekening pemakaian air PDAM bagi pelanggan Rumah Tangga A (RTA) pemakaian hingga 20 meter kubik.

Subsidi ini juga diberikan bagi pelanggan air PDAM Salatiga kategori sosial umum.

Program subsidi di RTA ini berlaku mulai tagihan rekening air PDAM Salatiga selama 11 bulan, mulai bulan Januari sampai November 2022.

Subsidi ini merupakan ide Wali kota Salatiga, Yuliyanto SE MM untuk meringankan beban masyarakat khususnya bagi pelanggan air PDAM.

Subsidi di golongan RTA ini diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat sehingga uangnya bisa untuk tambal sulam kebutuhan lainnya.

"Dana subsidi yang diberikan untuk pelanggan PDAM dalam pemba-



**Walikota Simbolis Menyerahkan Bantuan kepada warga**

nyaran pada golongan RTA pemakaian 20 meter kubik pertama tersebut untuk meringankan beban masyarakat. Apalagi saat ini masih dalam masa pandemi Covid 19," jelas Yuliyanto.

Peluncuran program ini secara simbolis diberikan Walikota Salatiga, Yuliyanto kepada keluarga Bapak Suparno yang beralamat di Warak RT 07 RW IV Kota Salatiga, Senin (31/01/2022). Subsidi ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di tengah-tengah pandemi Covid 19 ini.

"Subsidi akan diberikan untuk volume pemakaian sampai 20 m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik) per bulan, namun tidak termasuk biaya administrasi, dana meter, denda, dan biaya buka kembali atau buka kembali pasang baru. Subsidi pembayaran tagihan rekening air minum tersebut bagi pelanggan PDAM Salatiga golongan rumah tangga A (RTA) dan golongan sosial umum," jelas Walikota.

Dikatakan Walikota, subsidi ini khusus untuk pelanggan berdomisili di wilayah Salatiga kecuali sekolah dan panti asuhan yang dikelola pemerintah atau pemerintah daerah.

Dana alokasi subsidi pemakaian air ini selama tahun 2022 ini ditetapkan di APBD Salatiga 2022 sebesar Rp200 juta.

Subsidi oleh Pemkot Salatiga ini untuk membantu masyarakat. Harapannya bisa meringankan beban masyarakat agar lebih ringan di tengah pandemi Covid 19 ini.

Direktur PDAM Salatiga, Samino SE MM mengatakan subsidi pemakaian air di golongan RTA maksimal pemakaian 20 kubik tersebut setiap bulan diklaimkan ke BPKPD oleh PDAM. Karena pemakaian setiap pelanggan tidak sama.

"Untuk alokasi anggaran subsidi kurang lebih Rp 200 juta berada di PDAM tetapi uang ada di kas daerah tidak berada di PDAM. Setiap bulan kami mengklaim dan menagih ke

Pemkot Salatiga sesuai data," kata Samino.

Subsidi juga diberikan kepada kelompok sosial umum yang terdiri 13 kategori.

Kelompok sosial umum ini, adalah masjid/mushola, gereja, vihara/klenteng, panti asuhan, yayasan sosial, sekolah swasta.

Kemudian, hidrant umum, tempat penampung sementara (TPS), MCK umum, Pos Jaga, Balai RT dan RW serta makam.

Dijelaskan, Samino yang mendapat subsidi adalah pelanggan yang berdomisili di wilayah administratif Salatiga.

Dari data di PDAM Salatiga, proyeksi subsidi pembayaran tagihan rekening PDAM bagi pelanggan sosial umum (non sekolah negeri) dan rumah tangga A tahun 2022 selama 11 bulan, sebagai berikut, jumlah Sosial Umum sebanyak 98, Gereja 52 tempat, Masjid 149 tempat, Mushola 146 tempat, Vihara

1 tempat, Panti Asuhan 12 tempat, Yayasan Sosial 67 tempat, Sekolah Swasta 112 tempat dan rumah tangga A sebanyak 593 tempat.

"Dari proyeksi kami jumlah semuanya yang mendapat subsidi 1.230 tempat hingga pemakaian air 20 meter kubik," jelas Samino.

Namun ada beberapa item yang tidak mendapatkan subsidi dan tetap harus dibayar, yaitu biaya administrasi Rp 4.500, dana meter Rp 4.000, kemudian denda keterlambatan sesuai aturan PDAM, kemudian biaya pasang kembali.

PDAM tetap memberlakukan keputusan jika menunggak pembayaran dua bulan lebih dan diberlakukan sanksi sesuai aturan PDAM.



**Dr. Muh. Haris, M.Si**  
Wakil Wali Kota Salatiga

**(Advertorial / Prokompim Setda Salatiga)**



**Direktur PDAM Salatiga, Samino SE. MM**